

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dari lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Program My Darling di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan cukup baik sebagai inovasi pelayanan publik berbasis jemput bola. Program ini mampu mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta mempermudah akses pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil. Keberhasilan pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh komunikasi yang terbangun antara Dispendukcapil dengan pemerintah desa dan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia serta sarana pendukung yang memadai, disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab, serta struktur birokrasi yang mendukung koordinasi pelaksanaan di lapangan. Meskipun masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan tertentu, Program My Darling tetap mampu meningkatkan akses dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2. Ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, pelaksanaan Program My Darling menunjukkan adanya koordinasi internal yang jelas, komitmen pelaksana yang baik, serta

dukungan struktur organisasi yang fungsional. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan, terutama keterbatasan ketersediaan blangko KTP-el yang bergantung pada pemerintah pusat serta belum meratanya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Meskipun demikian, Program My Darling tetap menunjukkan keberlanjutan dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pasuruan.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dari lapangan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan, di antaranya:

1. Dinkes Kabupaten Pasuruan diharapkan untuk meningkatkan intensitas dan pemerataan sosialisasi Program My Darling secara berkelanjutan, khususnya kepada masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kesadaran administrasi kependudukan yang masih rendah. Sosialisasi tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan layanan keliling, tetapi juga secara rutin melalui kerja sama dengan pemerintah desa, RT/RW, serta pemanfaatan media sosial dan media informasi desa. Selain itu, Dinkes perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait ketersediaan blangko KTP-el agar pelaksanaan layanan keliling tidak terhambat ketika terjadi kekosongan stok, sehingga kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan Program My Darling, baik dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dukungan tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan program sebagai inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong sinergi lintas perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintah desa agar pelaksanaan Program My Darling dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
3. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program My Darling dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap, serta memanfaatkan layanan keliling yang disediakan pemerintah sangat diperlukan agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Program My Darling kepada lingkungan sekitar, sehingga pemanfaatan layanan administrasi kependudukan dapat semakin optimal.